



Peluang dan tantangan pemberdayaan petani sawit mandiri yang inklusif dan berkelanjutan di Kabupaten Ketapang, Provinsi Kalimantan Barat

Intisari

Petani kelapa sawit mandiri saat ini menghadapi isu keberlanjutan dan inklusivitas yang berat. Tropenbos Indonesia berkomitmen untuk meningkatkan kinerja petani kelapa sawit mandiri dan dengan demikian dapat berkontribusi pada lanskap secara berkelanjutan dan inklusif. Intervensi akan dilakukan di dua lanskap berbeda di Ketapang, Kalimantan Barat, antara tahun 2020-2024. Program kami termasuk memberikan akses petani terhadap pengetahuan tentang *Good Agricultural Practices*, mendukung aksi kolektif, memperkuat atau mendirikan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes), pelatihan pemetaan partisipatif, memfasilitasi diskusi di antara para pelaku lokal, dan menghubungkan dana internasional untuk pembangunan berkelanjutan dengan praktik-praktik aktual di lapangan. Info brief ini memberikan gambaran tentang tantangan utama dan permasalahan yang dihadapi sejauh ini.



Pengantar

Sektor kelapa sawit telah mengubah lanskap pedesaan di Indonesia dan menyediakan jutaan pekerjaan di pulau-pulau terluar Indonesia. Dengan pendapatan ekspor bernilai lebih dari 20 miliar USD, minyak sawit telah menjadi produk ekspor utama Indonesia. Namun kelapa sawit masih kontroversial karena dikaitkan dengan deforestasi, hilangnya keanekaragaman hayati, kebakaran, emisi gas rumah kaca yang besar, penggunaan lahan ilegal, pelanggaran hak buruh, marginalisasi masyarakat lokal, dan korupsi. Kontroversi ini telah menyebabkan pemangku kepentingan nasional dan internasional mengambil tindakan dan meningkatkan sektor keberlanjutan dan legitimasi. Prakarsa keberlanjutan yang dapat dibilang paling relevan adalah sektor swasta yang dipimpin *Round Table on Sustainable Palm Oil* (RSPO) dan respons Pemerintah Indonesia melalui prakarsa *Indonesian Sustainable Palm Oil* (ISPO). UNDP, bekerja sama dengan Kementerian Pertanian Indonesia, memprakarsai FoKSBI yang mengembangkan Rencana Aksi Nasional (RAN) untuk meningkatkan kinerja sektor melalui pendekatan multi-pemangku kepentingan. Pada bulan November 2019 Presiden Indonesia mengubah RAN menjadi Peraturan Presiden (Inpres No. 6, 2019), menyoroti momentum untuk meningkatkan sektor kinerja. Asumsi yang mendasari inisiatif ini adalah yang dilakukan dengan cara benar dan di lokasi yang tepat, kelapa sawit memberikan lebih banyak manfaat lingkungan dan sosial daripada tanaman pesaing seperti kedelai atau *rapeseed* dan karenanya membenarkan dukungan kami.

Produsen kelapa sawit yang paling sering dikaitkan dengan kinerja yang buruk adalah petani mandiri. Sementara petani kelapa sawit mandiri mencakup hampir 6 juta hektar pada tahun 2019 (DJP, 2019) dan beberapa diantaranya diorganisasikan kedalam skema 'plasma' dibawah panduan perusahaan, sebagian besar petani sawit beroperasi secara mandiri. Meskipun petani plasma sering menghasilkan panen yang sangat mirip dengan perusahaan,

terutama petani mandiri yang berkinerja buruk. Dukungan perusahaan atau pemerintah sering tidak ada untuk para petani dan mereka sering mengalami penderitaan secara berkepanjangan, rantai nilai tidak transparan yang menurunkan kualitas produksi, harga dan insentif untuk meningkatkan praktik. Petani kelapa sawit mandiri umumnya memiliki akses yang buruk ke bahan tanam berkualitas tinggi, keuangan, input pertanian dan pengetahuan tentang Good Agricultural Practices (GAP), yang mengarah pada hasil dan pendapatan petani yang rendah. Sementara temuan ini bukan hal baru (lihat e.g. Aidenvironment, 2013), mereka tetap relevan (Jelsma, 2019).

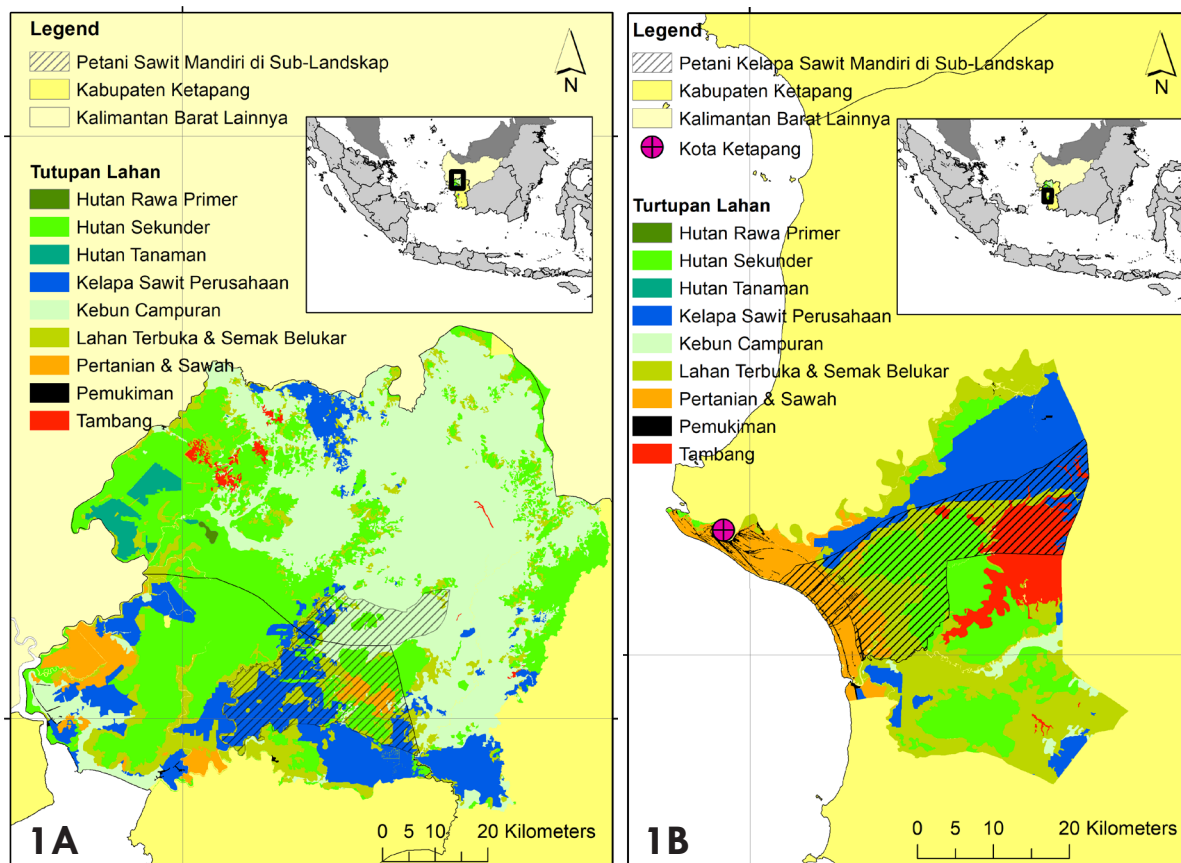
Dalam strategi 2020-2024, Tropenbos Indonesia (TI) berkomitmen untuk meningkatkan keberlanjutan dan inklusivitas petani mandiri sektor kelapa sawit (Tropenbos Indonesia, 2019). Namun jelas bahwa subsektor perkebunan kelapa sawit mandiri ini sangat luas, dari bentang alam yang beranekaragam, serta petani kecil yang beragam, sehingga diperlukan startegikhsus ketika akan mengembangkan intervensi yang tepat. Info brief ini memberikan wawasan awal tentang petani mandiri sektor minyak sawit di lokasi proyek Tropenbos Indonesia di Ketapang, Kalimantan Barat dan menyoroti kondisi spesifik lanskap petani kecil mandiri di sana. Pertama, karakterisasi kedua lokasi diberikan setelah hasil survey pendahuluan tentang petani kelapa sawit mandiri di wilayah proyek dibahas secara singkat. Selanjutnya dijelaskan

tentang kegiatan dan intervensi TI, tantangan utama yang dijumpai, dan beberapa kesimpulan tentang kemungkinan dan tantangan yang akan terjadi.

Karakteristik dan batas lanskap

Aktivitas utama kami adalah di lanskap Simpang Dua dan Pematang Gadung di Kabupaten Ketapang. Dalam setiap lanskap, sub-lanskap telah diidentifikasi yang secara eksplisit menangkap kondisi lingkungan dan sosial yang berbeda (Lihat **Tabel 1** dan **Gambar 1**). Singkatnya, bentang alam Simpang Dua mencakup masyarakat dayak yang lebih tradisional pada lahan tanah mineral, yang menghargai sistem produksi agroforestri mereka. Budidaya kelapa sawit mandiri hanya dilakukan dalam skala yang sangat terbatas. Sub-lanskap Pematang Gadung menunjukkan lebih banyak keragaman etnis, sebagian besar terletak di tanah gambut dan dekat dengan ibukota kabupaten. Budidaya kelapa sawit petani mandiri lebih umum dan penduduk lokal tampaknya kurang tertarik untuk mempertahankan sisa hutan mereka.

UU Desa No.6 / 2014 menyatakan bahwa pemerintah desa adalah unit pemerintahan mandiri terkecil dengan wewenang dan anggaran untuk mendukung masyarakat mereka dalam mengelola sumber daya alam mereka. Oleh karena itu batas-batas sub-lanskap didasarkan pada batas-batas desa karena ini dianggap penting dalam mengembangkan strategi inklusif dan memantau kemajuan di lapangan.



Gambar 1. Peta penggunaan lahan Simpang Dua (1A) dan Pematang Gadung (1B) dan wilayah proyek kelapa sawit petani mandiri (Data asli dari: Pribadi et al., 2020)

Tabel 1. Karakteristik sub-lanskap Simpang Dua dan Pematang Gadung

Sub-landscape	Simpang Dua	Pematang Gadung
Luas lahan (ha) _a	73,030	45,826
Kepadatan populasi (penduduk per km ²) _b	7	17
Komposisi etnis _c	Mayoritas Dayak	Banyak penduduk Madura, Melayu, Dayak dan Jawa
Sumber mata pencaharian utama _c	Pertanian & agroforestri	Pertanian
Kedekatan relatif dengan pusat kota	Jauh	Dekat dengan ibukota kabupaten
Estimasi kelapa sawit petani mandiri, ha _c	100-200	1000-2000
Gambut _a	Hampir tidak ada	Sekitar 50% daerah tersebut memiliki tanah gambut dalam
Hutan tersisa pada 2018, ha (% area) _d	21,752 (30%)	10,295 (22%)
Hutan hilang sejak 2000, ha (% area) _d	24,490 (33%)	8,491 (18%)
Kelapa sawit perusahaan, ha (% area) _d	22,957 (31%)	7,299 (16%)
Kebakaran lahan 2019, ha (% area) _d	218 (0%)	9,677 (21%)
Minat untuk mempertahankan hutan _c	Tinggi	Rendah
Adanya LSM _c	Rendah	Tinggi
Adanya orangutan _c	Tidak	Ya

Sumber: a = Shapefiles desa dari BPS (2011) dan peta gambut Departemen Pertanian; b = BPS Kayong Utara (2019) dan BPS Ketapang (2019); c = Tropenbos Indonesia (2020); d = CIFOR (2019)

Hasil survei pendahuluan

Untuk mendapatkan pemahaman yang lebih baik tentang kondisi dan karakteristik petani sawit mandiri di wilayah proyek, TI melakukan survey pendahuluan pada tahun 2019. Hasilnya menunjukkan bahwa di kedua lanskap: implementasi GAP terbatas, dukungan terhadap petani mandiri terbatas, penjualan melalui perantara, dan ukuran rata-rata plot bervariasi antara dua dan enam hektar di desa-desa yang berbeda. Masyarakat tradisional, sebagian besar orang Dayak di daerah hulu di sub-lanskap Simpang Dua dan juga orang Melayu asli di sub-landscape Pematang Gadung, umumnya mereka tidak memiliki sertifikat tanah. Sertifikat tanah lengkap secara umum banyak dijumpai di Desa Pematang Gadung, hal ini terkait dengan adanya program-program transmigrasi yang segera memberi para transmigran untuk melakukan pendaftaran tanah secara lengkap. Persyaratan hukum lainnya seperti Surat Tanda Daftar Budidaya (STD-B), surat wajib dari kantor perkebunan yang menyatakan tanaman apa yang sedang dibudidayakan, sebagian besar tidak dimiliki petani di kedua wilayah tersebut. Meskipun terdapat tanaman hingga 10 tahun, sebagian besar kelapa sawit berumur kurang dari lima tahun. Sebagian besar petani mengklaim telah menggunakan benih bersertifikat, tetapi masih belum jelas sampai sejauh mana ini benar-benar merupakan benih bersertifikat dan bukan sekadar salinan sertifikat. Jumlah petani yang saat ini mengindikasikan mereka ingin memperluas penanaman kelapa sawit mereka terbatas karena rendahnya harga sawit yang mereka terima dari produk mereka (Tropenbos Indonesia, 2020). Sebagian besar kondisi yang disebutkan di atas berlaku untuk kedua wilayah dan umum dijumpai di antara para petani kelapa sawit mandiri. Namun,

sementara beberapa intervensi akan relevan di kedua sub-lanskap, intervensi lain disesuaikan dengan kondisi spesifik sub-lanskap.

Intervensi

Untuk meningkatkan keberlanjutan dan inklusivitas petani mandiri sektor kelapa sawit di lanskap Simpang Dua dan Pematang Gadung, TI terlibat dalam kegiatan berikut:

• Pelatihan Pemetaan

Peta jelas yang menggambarkan informasi tentang izin usaha dan penetapan batas lahan yang tepat di dalam dan di luar wilayah kehutanan sebagian besar masih tidak dilengkapi dengan otorisasi desa. Hal ini perlu dikembangkan agar dapat berfungsi sebagai dasar dalam diskusi tentang penggunaan lahan dan perencanaan penggunaan lahan. Peta akan dikembangkan berdasarkan citra satelit dan pelaksanaan pelatihan tentang pemetaan partisipatif. Peta-peta ini akan menangkap klasifikasi lahan dan memberikan pengetahuan terkini tentang jumlah petani sawit mandiri dan area yang mereka kuasai. Latihan pemetaan akan melibatkan perwakilan perempuan dan pemuda, dan mempromosikan inklusivitas. Kegiatan ini sangat relevan di kedua sub-lanskap.

• Membatasi emisi GRK dan deforestasi

- Dalam lanskap Pematang Gadung akan ada upaya perluasan untuk meminimalkan konversi lebih lanjut terhadap lahan gambut menjadi kelapa sawit. Tropenbos Indonesia bekerja sama dengan *Wetland International* telah melakukan pendugaan nilai stok karbon di hutan Rawa

Gambut Pematang Gadung dan memperkirakan bahwa jika dilestarikan dengan benar, emisi sebesar 13,6 juta tCO₂-e dapat dihindari dari 2019 hingga 2041 (Tropenbos Indonesia, 2019). TI akan berupaya menghubungkan otoritas lokal dengan pendanaan *Result Based Payment REDD+*. Tujuannya adalah untuk mengarahkan pembayaran Karbon kepada masyarakat lokal dan dengan demikian meningkatkan insentif untuk mempertahankan cadangan karbon. Sementara TI sudah terlibat dengan otoritas lokal dan nasional, TI juga akan terlibat dengan organisasi sertifikasi karbon berbasis masyarakat seperti Plan-Vivo, yang memiliki pengalaman luas dalam menghubungkan ekosistem dengan keuangan perusahaan dan konservasi lingkungan.

- Pada tanah mineral di sub-lanskap Simpang Dua akan ada lebih banyak penekanan pada pemeliharaan hutan yang ada dan memberikan bantuan dalam mendaftarkan sekitar 10.000 ha sebagai Hutan Lindung. Akan ada upaya untuk memberi insentif kepada penduduk setempat untuk melindungi hutan mereka melalui skema kompensasi kehilangan NKT RSPO melalui kolaborasi dengan penyedia layanan lingkungan sebagai Modal Lestari. Upaya ini adalah untuk memastikan bahwa ekspansi petani kecil mandiri di masa depan tidak akan dikembangkan dengan mengorbankan hutan alam yang masih tersisa dan memiliki dampak terbatas pada keanekaragaman hayati agroforestri tembawang, sistem yang masih umum di sub-lanskap Simpang Dua.

• Meningkatkan kinerja petani kelapa sawit mandiri

- Langkah pertama memerlukan keterlibatan terkait masalah hukum yang dapat menghambat dukungan petani kecil dari pemerintah, LSM atau sektor swasta, karena para pemangku kepentingan ini mungkin menemukannya di luar mandat mereka untuk membantu petani 'ilegal'. TI telah membantu petani kecil dalam memperoleh STD-B di sub-lanskap Pematang Gadung. Jelas bahwa pemerintah daerah sering tidak mengalokasikan dana untuk register dengan benar dan mendukung petani mereka. TI akan melobi pemerintah daerah dan pemangku kepentingan lainnya untuk meningkatkan pendanaan dalam memfasilitasi petani dan otoritas lokal untuk mencapai kewajiban hukum.
- Mendukung implementasi GAP di kalangan petani mandiri. Ini termasuk tetapi tidak terbatas pada meningkatkan akses ke bahan tanam berkualitas tinggi, pengetahuan tentang pupuk yang tepat, meningkatkan akses ke input pertanian, keuangan dan kebutuhan lain untuk meningkatkan praktik di lapangan. SNV Netherlands Development

Organization telah mengembangkan metodologi yang relevan untuk meningkatkan kinerja kelapa sawit petani mandiri dan TI akan bermitra dengan SNV untuk mengimplementasikannya di wilayah proyek.

- Ada beberapa masalah mendasar yang perlu diselesaikan sebelum pelatihan tentang GAP menjadi relevan. Jelas infrastruktur harus dalam kondisi baik, akses pasar tidak boleh dibatasi dan keuangan untuk penerapan GAP harus ada. TI akan melobi dengan otoritas terkait, pelaku sektor swasta, dan LSM untuk meningkatkan prasyarat penerapan GAP.

• Mendukung aksi kolektif dan memanfaatkan keunggulan skala

Menciptakan kelompok tani, memanfaatkan aksi kolektif dan keuntungan terkait skala adalah bagian integral dari banyak inisiatif keberlanjutan terkemuka seperti RSPO, ISPO dan RAN. Ada beberapa jalur menuju aksi kolektif dan praktik inklusif dan berkelanjutan terkait seperti melalui kelompok tani atau koperasi, atau perusahaan desa / Badan Usaha Milik Desa (BUMDes).

- Kelompok tani atau koperasi; organisasi petani dapat meningkatkan posisi tawar mereka dan membangun hubungan langsung dengan pabrik. Ini dapat mengurangi panjangnya rantai pasokan dan menyebabkan harga yang lebih baik bagi petani. Juga input pertanian dapat dibeli dalam skala yang lebih besar dan memeriksa kualitas input ini, harga dan melobi dukungan teknis lebih mudah secara kolektif. Namun, memelihara kolektif tidak mudah. Untuk rincian tentang aksi kolektif yang sukses di antara petani kecil kelapa sawit tetapi juga ancaman terhadap aksi kolektif lihat Jelsma (2019).
- Perusahaan Desa / BUMDes; TI bertemu dengan perusahaan desa yang berfungsi dengan baik mengelola budidaya dan penjualan kelapa sawit (lihat Kotak 1 dan Purwanto dan Tjawikrama, 2019). Seperti halnya organisasi petani, mendukung perusahaan desa dapat meningkatkan manfaat skala dan meningkatkan rantai pasokan petani kecil mandiri yang tidak transparan dan tidak efisien. Keuntungan dengan perusahaan desa akan diinvestasikan lagi di desa. TI telah melakukan pelatihan untuk meningkatkan kinerja BUMDes yang ada dan bermaksud untuk memperluas kegiatan ini. Dalam sub-lanskap Simpang Dua, TI juga bermaksud memfasilitasi pengembangan BUMDes yang melibatkan pengumpulan Tandan Buah Kosong (TBK) dari pabrik lokal yang saat ini mengalami kesulitan dalam membuang TBK mereka. Dengan demikian BUMDes dapat mengurangi impor pupuk kimia, menyediakan pupuk organik dan

dengan demikian mengurangi aliran keluar nutrisi yang umum dari perkebunan petani kecil dan berkontribusi pada ekonomi sirkuler.

- **Memfasilitasi pengambilan keputusan berbasis bisnis dengan petani kecil dan alternatif pendukung**

Budidaya kelapa sawit monokultur mungkin bukan pilihan terbaik bagi petani. Tentu saja di lahan gambut di mana penanaman kelapa sawit membutuhkan lebih banyak keterampilan dan sumber daya, hasil panen petani seringkali sangat rendah dan mungkin ada alternatif yang lebih baik. TI telah menstimulasi petani sawit mandiri untuk mengembangkan penanaman campuran berbasis kelapa sawit dengan nanas dan buah naga di Pematang Gadung. TI akan melakukan pemodelan ekonomi dengan para petani tentang manfaat dari berbagai penggunaan lahan dan selanjutnya mendukung pengembangan pupuk organik, peternakan, produksi ikan segar dan menghubungkan kelompok-kelompok perempuan ke pasar.

Tantangan

Kurangnya koordinasi di tingkat horizontal maupun vertikal antara pemangku kepentingan di Indonesia yang bekerja pada kelapa sawit yang berkelanjutan telah didokumentasikan dengan baik (Pacheco et al., 2018). Koordinasi yang jelas antara para pemangku kepentingan juga merupakan hal mendasar dalam program kami. Sementara banyak pemangku kepentingan yang relevan telah diidentifikasi, yang selaras ini dan akan tetap menjadi sebuah menantang.

Kedua sub-lanskap mengalami gelombang masuknya investor yang mungkin bertentangan dengan upaya konservasi. Juga tampaknya hanya ada sedikit minat masyarakat lokal dalam melestarikan hutan gambut di daerah Pematang Gadung, di mana kebakaran gambut terjadi pada tahun 2019. Lebih jauh lagi, program pemerintah untuk menyelesaikan transmigrasi di lahan gambut baru-baru ini pada tahun 2012 dan penggalian kanal untuk menurunkan permukaan air tidak menunjukkan urgensi terkait konservasi cadangan karbon di lahan gambut. Namun, ketika ada kepemilikan tanah yang jelas dan tanah diolah dengan benar, insiden kebakaran kemungkinan akan berkurang. Tantangan besar akan menghubungkan skema pembayaran karbon nasional dan internasional dengan desa-desa dan masyarakat di wilayah proyek, sehingga dengan demikian akan memberi mereka mata pencaharian yang tepat dan minat untuk mempertahankan hutan dan stok karbon. Jika ini dapat dicapai, pembangunan yang berkelanjutan dan inklusif tampaknya mungkin dilakukan.

Namun, tata kelola lahan di Indonesia menjadi perdebatan, dan dengan dalih melindungi sumber daya alam Indonesia dan kepentingan sektor kelapa sawit, Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan, baru-baru ini menghentikan pembagian konsesi perusahaan dan data hak penggunaan lahan. Dengan demikian secara aktif membatasi transparansi yang semakin dituntut dalam rantai nilai global modern (CNN Indonesia, 2019). Jelas ada banyak kepentingan yang saling bersaing dan bahwa apa yang tampak sebagai jalan berkelanjutan mungkin memiliki konsekuensi yang tidak diinginkan. Meningkatkan transparansi misalnya juga dapat mengecualikan petani mandiri yang dalam kondisi saat ini tidak dapat memenuhi persyaratan keberlanjutan yang mahal. Bekerja menuju pembangunan yang lebih inklusif dan berkelanjutan jelas dapat menyebabkan dampak buruk jika tidak dikelola dengan baik. Oleh karena itu, pelaporan dan pemantauan efek yang konstan diperlukan untuk menginformasikan negosiasi yang konstan antara para pemangku kepentingan. Negosiasi ini dan harus mengarah pada penyesuaian yang memanfaatkan perkembangan yang diinginkan dan menghindari atau melawan hasil yang tidak diinginkan; menjadi pembangunan lokal, menghindari deforestasi dan menjaga cadangan karbon.

Kesimpulan

Misi TI adalah membuat pengetahuan bermanfaat bagi hutan dan manusia. Bekerja menuju sektor kelapa sawit mandiri yang berkelanjutan dan inklusif di dua bentang alam yang berbeda di Kabupaten Ketapang, Kalimantan Barat, memberikan peluang menarik untuk melakukannya. Berbagai kegiatan telah diidentifikasi untuk meningkatkan kondisi petani sawit mandiri, pengelolaan penggunaan lahan dan perlindungan sumber daya alam. Kegiatan-kegiatan ini termasuk melakukan pelatihan pemetaan yang tepat yang dapat berfungsi sebagai dasar untuk perencanaan penggunaan lahan partisipatif dan diskusi antara penduduk setempat dan pihak ketiga. Juga model simulasi ekonomi akan dilakukan dengan petani lokal dan mereka yang tertarik untuk menjadi petani kelapa sawit. Program ini lebih lanjut berfokus pada peningkatan ketersediaan pengetahuan tentang GAP, bekerja menuju aksi kolektif baik melalui perusahaan desa atau organisasi petani dan dengan demikian meningkatkan rantai pasokan untuk petani mandiri. Kegiatan-kegiatan ini mendukung banyak kebijakan pemerintah saat ini, mulai dari memfasilitasi implementasi ISPO dan RAN untuk program Perhutanan Sosial, pengurangan emisi karbon, Inisiatif Satu Peta dan kebijakan Reformasi Agraria, yang seharusnya memberi petani hak kepemilikan tanah yang layak. Rentang kegiatannya ambisius tetapi banyak komponen yang saling terkait. Tantangan besar

bagi TI akan menyelaraskan berbagai pemangku kepentingan yang mempengaruhi lanskap ini. Akhirnya pembicaraan tentang dana dan tantangan nyata terletak pada bagaimana agar dana yang tersedia, baik secara internasional maupun nasional, dapat memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi kehidupan petani yang tinggal di sekitar kawasan lingkungan yang berharga melalui perlindungan habitat bagi ekosistem di sekitar mereka.

Box 1: Village companies/BUMDes

A BUMDes is "...a business established through a BUMDes adalah "... bisnis yang didirikan melalui majelis umum desa, yang dikelola oleh para profesional dan independen dari pejabat desa meskipun sebagian besar modalnya adalah milik desa. BUMDes adalah bisnis sosial untuk mengelola aset desa, meningkatkan pembangunan ekonomi, kesejahteraan masyarakat, dan meningkatkan pendapatan desa tambahan. Dengan demikian, kegiatannya tidak diperbolehkan untuk merusak bisnis masyarakat yang ada, tetapi untuk memperkuat kapasitas dan mengatasi hambatan melalui fasilitasi, pemberian layanan, upaya sinergi, dan menciptakan nilai tambah. BUMDes berperan sebagai perantara, pemasok dan distributor. Dengan meningkatnya dana desa tahunan yang dikirim oleh pemerintah pusat, sejak 2016, setiap desa atau kelompok desa terdorong untuk mendirikan BUMDes untuk mempromosikan produk-produk lokal. "

Sumber: Purwanto dan Tjawikrama (2019; p.69)

Referensi

1. Aidenvironment, 2013. *Diagnostic Study on Indonesian Palm Oil Smallholders: Developing a better understanding of their performance and potential*. International Finance Corporation.
2. BPS Kayong Utara & Ketapang, *Kayong Utara & Ketapang Dalam Angka 2019*, Badan Pusat Statistik.
3. CIFOR, 2019. *Atlas of Deforestation and Industrial Plantation*, in: <https://atlas.cifor.org/>, visited 20-12-2019, Centre for International Forestry Research, Bogor.
4. CNN Indonesia, 2019. *Luhut soal Batasi Akses HGU: Ada Korporasi Belum Patuh Aturan*, <https://www.cnnindonesia.com/ekonomi/20190509154845-92-393493/luhut-soal-batasi-akses-hgu-ada-korporasi-belum-patuh-aturan>, visited 20-12-2019.
5. DJP, 2019. *Statistik Perkebunan Indonesia; Kelapa Sawit 2017-2019*. Direktorat Jenderal Perkebunan, Jakarta.
6. Jelsma, I., 2019. *In search of sustainable and inclusive palm oil production: The role of smallholders in Indonesia*, PhD dissertation at Geosciences Faculty, Utrecht University, Utrecht.
7. Pacheco, P., Schoneveld, G., Dermawan, A., Komarudin, H., Djama, M., 2018. *Governing sustainable palm oil supply: Disconnects, complementarities, and antagonisms between state regulations and private standards*. Regulation & Governance.
8. Pribadi, U.A., Setiabudi, Suryadi, I., Laumonier, Y., 2020. *West Kalimantan Ecological Vegetation Map 1:50 000*, Centre for International Forestry Research, Bogor.
9. Purwanto, E., Tjawikrama, D., 2019. *The role of village assemblies in overcoming barriers to smallholder inclusiveness: examples from Indonesia*, in: EFRN News 59, Exploring inclusive oil palm production, Wageningen.
10. Tropenbos Indonesia, 2019. *ISP and Large-Scale Oil-Palm Plantation Interventions Approaches*, Tropenbos Indonesia, Bogor.
11. Tropenbos Indonesia, 2020. *Profile of independent smallholders oil-palm plantation in Ketapang District*. Tropenbos Indonesia in collaboration with Operasi Wallacea Terpadu (OWT), Bogor.
12. Tropenbos Indonesia, 2019. *Estimasi Cadangan Karbon dan Kajian Kelayakan Program REDD+ di Ekosistem Hutan Rawa Gambut Pematang Gadung, Kabupaten Ketapang, Provinsi Kalimantan Barat*. Tropenbos Indonesia in collaboration with Wetland International, Bogor.

Diterbitkan oleh:

Tropenbos Indonesia

Hak cipta: Tropenbos Indonesia, January 2020

(Teks dapat direproduksi untuk tujuan non-komersial dengan mengutip sumbernya)

Kutipan:

Purwanto E, Jelsma I. 2020. *Peluang dan tantangan pemberdayaan petani sawit mandiri yang inklusif dan berkelanjutan di Kabupaten Ketapang, Provinsi Kalimantan Barat*. Info brief - Januari, 2020.

Tropenbos Indonesia. Bogor.

Foto sampul:

Perkebunan petani kelapa sawit di Kabupaten Ketapang

Kontak:

Dr. Edi Purwanto: edipurwanto@tropenbos-indonesia.org | tropenbos@tropenbos-indonesia.org

Tropenbos Indonesia

Jl. Akasia I Blok P-I/6, Tanah Sareal, Bogor - 16163, Indonesia

Phone: +62 251 - 8316156

www.tropenbos-indonesia.org

